

## TERBENTUKNYA PROVINSI BANTEN DINAMIKA PEMERINTAHAN DI BANTEN, TERBENTUKNYA DINASTI POLITIK, HEGEMONI SELAMA REFORMASI HINGGA KEKINIAN

Agus Rustamana<sup>1</sup>, Farhan Aldy Wiguna<sup>2</sup>, Sazkia Esa Salsabila Rusmaningtyas<sup>3</sup>, Nella Asy Syfa Maulidna<sup>4</sup>,  
Marice Nainggolan<sup>5</sup>, Engel Marsaulina Hutasoit<sup>6</sup>  
Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sultan Ageng  
Tirtayasa, Serang  
E-mail: \*[farhanwiguna21240@gmail.com](mailto:farhanwiguna21240@gmail.com)

### ABSTRAK

Provinsi Banten didirikan pada tahun 2000 berdasarkan keinginan masyarakat yang ingin memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan sesuai dengan karakter sosial-ekonomi daerahnya. Namun, sejarah Banten sebagai wilayah yang pernah menjadi pusat kekuasaan Islam melalui Kesultanan Banten membentuk dasar budaya dan politik yang kuat, serta memengaruhi kekuasaan secara turun-temurun. Jejak dinasti politik di Banten tidak hanya terlihat pada masa kejayaan kesultanan, tetapi juga berlanjut dalam sistem politik masa kini. Cara pewarisan kekuasaan secara turun-temurun serta penggunaan simbol keagamaan untuk memperkuat kredibilitas kekuasaan adalah pola yang terus berlangsung dari masa lalu hingga era reformasi. Setelah era reformasi, meskipun sistem pemerintahan Indonesia sudah beralih ke prinsip demokrasi, praktik oligarki dan dinasti politik masih kuat berakar di Banten. Tokoh-tokoh lokal seperti kyai tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang besar. Pengaruh dari kekerabatan seperti yang terjadi dalam Dinasti Atut menunjukkan bahwa demokrasi di Banten masih menghadapi tantangan dari struktur oligarki dan dominasi kekuasaan lokal. Dengan demikian, meskipun Banten telah mengalami perubahan administrative dan politik, warisan sejarah, budaya politik lokal, serta struktur kekuasaan kekerabatan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi perkembangan demokrasi dan pemerintahan daerah hinggasekarang.

### Kata kunci

**Dinasti politik, politik hegemoni, praktik oligarki.**

### ABSTRACT

*Banten Province was established in 2000 based on the people's desire for a government that was closer to their local socio-economic characteristics. However, Banten's history as a region that was once the center of Islamic power through the Banten Sultanate has formed a strong cultural and political foundation, influencing the hereditary power system. Traces of political dynasties in Banten are not only evident during the sultanate's heyday but also continue in the current political system. The hereditary inheritance of power and the use of religious symbols to strengthen the credibility of power are patterns that have persisted from the past until the reform era. After the reform era, although Indonesia's system of government has shifted to democratic principles, oligarchic practices and political dynasties remain deeply rooted in Banten. Local figures, such as kyai (Islamic religious leaders), not only serve as religious leaders but also wield significant political influence. The influence of kinship ties, as seen in the Atut Dynasty, demonstrates that democracy in Banten still faces challenges from oligarchic structures and the dominance of local power. Thus, although Banten has experienced administrative and political changes, its historical heritage, local political culture, and kinship power structures remain the main factors influencing the development of democracy and regional governance to this day.*

### Keywords

**Political dynasty, political hegemony, oligarchic practice.**

## 1. PENDAHULUAN

Provinsi Banten terbentuk dari pemekaran Provinsi Jawa Barat dan secara resmi diakui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Provinsi ini mulai berdiri sebagai daerah otonom pada tanggal 4 Oktober 2000 (Pemerintah Republik Indonesia, 2000). Masa otonomi memberi ruang bagi perubahan dalam struktur pemerintahan daerah, termasuk munculnya fenomena dinasti politik di berbagai wilayah, termasuk Banten (Aspinall & As'ad, 2016).

Provinsi Banten memiliki narasi sejarah yang kompleks dan beragam, merangkum evolusi politik dan sosial penduduknya. Pembentukan provinsi ini bukan hanya pemisahan langsung dari Jawa Barat, tetapi juga merupakan manifestasi dari aspirasi masyarakat yang sudah lama ada. Sejarah Pembentukan: Keinginan untuk melepaskan diri dari Jawa Barat muncul pada awal 1953; namun, itu hanya memuncak pada tahun 2000. Perkembangan ini memerlukan segudang dinamika politik yang melibatkan publik, tokoh politik yang berpengaruh, dan pemerintah pusat.

Dinamika Pemerintahan: Setelah ditetapkan sebagai provinsi otonom, Banten telah mengalami banyak perubahan dalam struktur pemerintahannya. Dinamika ini mencakup transformasi dalam distribusi kekuasaan, perumusan kebijakan publik, serta interaksi antara entitas pemerintah daerah dan masyarakat yang mereka layani. Dinasti Politik: Sebuah fenomena penting yang diamati di Banten adalah munculnya dinasti politik, di mana otoritas sering diwariskan dalam garis keturunan keluarga tertentu. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi proses demokrasi dan menghambat keterlibatan politik warga negara. Hegemoni Selama Reformasi: Era Reformasi memicu perubahan besar dalam kerangka politik Banten. Munculnya tokoh-tokoh politik baru di samping benteng partai-parpol lokal telah berkontribusi pada hegemoni yang berlaku yang bertahan hingga hari ini.

Tujuan-tujuan ini bertujuan agar studi tentang Provinsi Banten dapat memberikan kajian yang menyeluruh baik secara historis, politik, sosial, maupun ekonomi terkait pembentukan Provinsi Banten, proses terbentuknya dinasti politik yang mengakar kuat dalam struktur pemerintahan lokal, mengkaji besar pengaruh hegemoni politik yang berlangsung selama masa Reformasi, yang menciptakan pola dominasi yang tidak hanya mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan publik dari masa reformasi hingga masa kini, maka akan kami sampaikan sebagai berikut: (1) Mengetahui latar belakang dan proses pembentukan Provinsi Banten sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat yang berpangkal dari aspirasi masyarakat untuk otonomi dan pengelolaan potensi daerah secara mandiri. (2) Menganalisis dinamika pemerintahan pasca pembentukan provinsi yang mencerminkan kerumitan dalam memahami dan mengelola dinamika politik tingkat daerah, termasuk dominasi dinamika politik dalam struktur pemerintahan daerah; (3) Mengkaji pengaruh dinasti politik yang berpengaruh di posisi strategis pemerintahan serta bagaimana dampak hegemoni politik dinasti tersebut berperan dalam menguasai berbagai aspek kehidupan masyarakat Banten, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan organisasi masyarakat pada demokrasi lokal, partisipasi politik, akuntabilitas publik dan kebijakan yang berpihak pada Masyarakat; (4) Meneliti konflik antara demokrasi dan oligarki dalam konteks hegemoni dinasti politik, serta implikasinya terhadap tata Kelola Provinsi Banten.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini difokuskan pada penelusuran data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, khususnya artikel, buku, jurnal serta dokumen resmi, untuk menganalisis mengidentifikasi, dan menelaah topik yang akan dibahas dijadikan sebagai sumber utama, tanpa melakukan penelitian lapangan.

Dalam memahami dinamika pemerintahan di Provinsi Banten, menjadi penting untuk memahami terlebih dahulu landasan teori yang berfungsi sebagai kerangka analisis. Teori yang digunakan Adalah teori kelembagaan, teori dinasti politik, teori hegemoni, teori desentralisasi dan teori otonomi daerah. Pembentukan Provinsi Banten sebagai entitas administratif baru pada tahun 2000 bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi adalah hasil dari dinamika politik nasional dan lokal pasca-reformasi. Selain itu, kemunculan dinasti politik dan hegemoni kekuasaan menjadi suatu fenomena yang tersendiri dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teori politik dan sosiologi politik.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terbentuknya Provinsi Banten pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Karena letak geografis yang jauh dan perbedaan karakteristik sosial serta ekonomi, masyarakat Banten menginginkan pemerintahan yang lebih dekat dan mandiri. Aspirasi ini mulai kuat sejak tahun 1990-an dan akhirnya terwujud pada 4 Oktober 2000, ketika Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Banten sebagai provinsi baru melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Dengan status provinsi, Banten dapat mengelola pembangunan daerahnya secara lebih fokus dan mandiri. Terbentuknya Dinasti Politik di Banten pada awalnya, Banten adalah wilayah bawahan Kesultanan Pajajaran dan kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon. Pada awal abad ke-16, Islam mulai berkembang di wilayah ini melalui dakwah para wali dan pedagang Muslim.

Pendiri Dinasti Sultan Maulana Hasanuddin (1527–1570) merupakan putra Sunan Gunung Jati (Sultan Cirebon) yang dipercaya memimpin Banten. Ia mendirikan Kesultanan Banten secara mandiri dengan pusat pemerintahan di Banten lama (sekarang Banten Lama). Sultan Maulana Hasanuddin memisahkan Banten dari Cirebon secara politik melalui penguatan militer dan strategi perdagangan. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang menjadi salah satu pelabuhan utama di jalur perdagangan internasional, terutama berhubungan dengan bangsa Portugis, Belanda, dan Arab.

Dinasti Banten juga memanfaatkan kekuatan agama (Islam) untuk memperkuat legitimasi politiknya. Sistem pemerintahan dijalankan secara turun-temurun melalui garis keturunan laki-laki, sehingga membentuk dinasti politik yang kuat. Sultan memiliki otoritas penuh dalam bidang politik, ekonomi—khususnya perdagangan rempah-rempah—serta keagamaan. Selain itu, pernikahan politik sering dilakukan untuk memperkuat aliansi dengan kerajaan maupun jaringan pedagang lainnya.

Pengaruh dinasti ini sangat besar, terbukti dari keberhasilannya mempertahankan kedaulatan Banten hingga abad ke-18 dan menjadikan Kesultanan Banten sebagai salah satu pusat Islam dan perdagangan terbesar di Nusantara. Pengaruh Hegemoni Politik Di Banten dari Masa Reformasi Hingga Masa Kini, pengaruh hegemoni politik ini sebenarnya telah terjadi sejak masa tradisional (kesultanan) yang kemudian diruntuhkan oleh pemerintah kolonial pada abad ke-19 hingga masa reformasi.

Pada peralihan masa tradisional menjadi masa kolonial, pemerintah kolonial yakni Jendral Daendels memperbaharui wilayah Banten dan membaginya menjadi beberapa

bagian. Terdiri dari tiga kabupaten yakni, Banten Hulu, Banten Hilir dan Anyer. Sementara pada masa kolonial inggris terbagi menjadi empat kabupaten yakni, Banyen Lor, Banten Kulon, Banten Tengah dan Banten Kidul. Perubahan reformasi teritorial ini memiliki dampak terhadap keadaan politik, ekonomi dan budaya. Penataan ulang wilayah Banten ini tidak hanya dipengaruhi oleh bayang- bayang situasi politik dan ekonomi kota besar seperti Jakarta namun juga bersumber pada aspek ekologis serta kepentingan umum masyarakat yang beragam.

Sejarah hegemoni politik Banten tidak akan terlepas dari besarnya pengaruh Keluarga Atut, yakni Dinasti Atut Chosiyah yang sempat menguasai pangkat Gubernur serta berbagai posisi strategis pada pemerintahan kabupaten maupun kota di Banten. Meskipun era reformasi telah membawa sistem politik yang lebih demokratis dan desentralisasi. Namun, Banten tak terlepas dari yang Namanya Dinasti Politik. Struktur oligarki berbasis politik kekerabatan inilah yang mengakar sehingga menjadi salah satu hambatan utama bagi perkembangan demokrasi yang nyata di Banten dari era reformasi hingga kini.

#### 4. KESIMPULAN

Provinsi Banten didirikan pada tahun 2000 berdasarkan keinginan masyarakat yang ingin memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan sesuai dengan karakter sosial-ekonomi daerahnya. Namun, sejarah Banten sebagai wilayah yang pernah menjadi pusat kekuasaan Islam melalui Kesultanan Banten membentuk dasar budaya dan politik yang kuat, serta memengaruhi kekuasaan secara turun-temurun.

Jejak dinasti politik di Banten tidak hanya terlihat pada masa kejayaan kesultanan, tetapi juga berlanjut dalam sistem politik masa kini. Cara pewarisan kekuasaan secara turun-temurun serta penggunaan simbol keagamaan untuk memperkuat kredibilitas kekuasaan adalah pola yang terus berlangsung dari masa lalu hingga era reformasi. Setelah era reformasi, meskipun sistem pemerintahan Indonesia sudah beralih ke prinsip demokrasi, praktik oligarki dan dinasti politik masih kuat berakar di Banten.

Tokoh-tokoh lokal seperti kyai tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang besar. Pengaruh dari kekerabatan seperti yang terjadi dalam Dinasti Atut menunjukkan bahwa demokrasi di Banten masih menghadapi tantangan dari struktur oligarki dan dominasi kekuasaan lokal.

Dengan demikian, meskipun Banten telah mengalami perubahan administratif dan politik, warisan sejarah, budaya politik lokal, serta struktur kekuasaan kekerabatan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi perkembangan demokrasi dan pemerintahan daerah hingga sekarang.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. and Berenschot, W. (2021) *Democracy for sale: Elections, clientelism and the state in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Haris, S. (2022) *Desentralisasi dan otonomi daerah: Reformasi pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Peters, B. G. (2021) *Institutional theory in political science: The new institutionalism* (4th edn). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Robison, R. and Hadiz, V. R. (2020) *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. London: Routledge.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Aspinall, E., & As'ad, M. U. (2016). *Understanding family politics: Successes and failures of political dynasties in regional Indonesia*. *South East Asia Research*, 24(3), 420–435. <https://doi.org/10.1177/0967828X16659571>
- Hidayat, S. et al. (2020). *Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, UIN SGD. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/8316>
- Remanu, A. J. K. (2025). *Kekuasaan Politik Keluarga Ratu Atut di Provinsi Banten*. *Jurnal Governance*, UTA45 Jakarta. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/download/8427/3248>
- PPID Banten. (n.d.). *Sejarah Provinsi Banten*. <https://www.ppidbanten.org/profil/sejarah-Provinsi-Banten/>
- Pradita, R. D., Apasha, R., Fatih, M. S., & Wulandari, L. (2025). *Dinamika keterwakilan politik dalam politik dinasti: Studi kasus dominasi elit pada era Ratu Atut di Banten*. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(10), 81–90. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i10.12214>
- Rantikawati, E. (2018). *Hegemoni dinasti politik: Keberadaan dinasti Banten dalam demokrasi*. *Academia.edu*. [https://www.academia.edu/37908340/Hegemoni\\_Dinasti\\_Politik\\_Keberadaan\\_Dinasti\\_Banten\\_Dalam\\_Demokrasi\\_Endah\\_Rantikawati\\_6670160023](https://www.academia.edu/37908340/Hegemoni_Dinasti_Politik_Keberadaan_Dinasti_Banten_Dalam_Demokrasi_Endah_Rantikawati_6670160023)
- Remanu, A. J. K., Ramadhani, N. A., Dewi, T. R., Azzahra, A. J., & Ridwan. (2025). *Dampak dinasti politik terhadap demokrasi lokal: Kekuasaan politik keluarga Ratu Atut di Provinsi Banten*. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 10(2). <https://doi.org/10.52447/gov.v10i2.8427>
- Sukri, M. A. F. (2020). *Dinasti politik di Banten: Familisme, strategi politik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat*. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 169–190. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>